

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) TERHADAP  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA SUWANGI TIMUR  
KECAMATAN SAKRA KABUPATEN LOMBOK TIMUR DI MASA  
PANDEMI COVID 19**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh  
Gelar Sarjana Strata (SI) pada program studi ilmu pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  
Universitas Muhammadiyah Mataram**



**OLEH:**

**IMRON ROSIDI**  
**NIM. 217130102**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

**2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) TERHADAP  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA SUWANGI TIMUR  
KECAMATAN SAKRA KABUPATEN LOMBOK TIMUR DI MASA  
PANDEMI COVID 19**

Telah memenuhi syarat dan disetujui

Tanggal 09 maret 2022

**Mengetahui**

**Dosen Pembimbing I**



**Drs. Amil, M.M.**  
**NIDN. 0831126204**

**Mengetahui**

**Dosen Pembimbing II**



**M. Aprian Jablani, S.AP., M.AP.**  
**NIDN. 0804049501**

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi**

**Ilmu Pemerintahan**



**Ayatullah Hadi, S.Ip., M.Ip.**  
**NIDN. 0816057902**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**SKRIPSI**  
**IMPLEMENTASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI DESA**  
**SUWANGI TIMUR KECAMATAN SAKRA KABUPATEN LOMBOK**  
**TIMUR DI MASA PANDEMI COVID 19**

Disusun dan Diajukan oleh:

**IMRON ROSIDI**  
**NIM. 217130102**

**PROGRAM STUDI**  
**ILMU PEMERINTAHAN**

Telah dipertahankan di depan penguji dalam ujian Skripsi pada tanggal 02 februari 2022  
Dan Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

**Tim Penguji**

- |  |            |  |
|--|------------|--|
| 1. <b><u>Drs. Amil, M.M</u></b><br><b>NIDN. 0831126204</b>                 | Ketua      | <br>(.....) |
| 2. <b><u>M. Aprian Jailani, S.AP., M.AP</u></b><br><b>NIDN. 0822048901</b> | Anggota I  | <br>(.....) |
| 3. <b><u>Dr. Siti Atika Rahmi, M.Si</u></b><br><b>NIDN. 0815118302</b>     | Anggota II | <br>(.....) |

Mengetahui  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah, Mataram  
Dekan,

  
**Dr. H. Muhammad Ali, M.Si**  
**NIDN. 0806066801**

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IMRON ROSIDI

Nim : 217130102

**Dengan ini Saya Menyatakan Bahwa:**

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di tingkat Universitas Mataram maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa pihak lain kecuali arahan tim pembimbing
3. Dalam karya tulis tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar kepada karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Mataram 07 Maret 2022



(Imron Rosidi)

NIM 217130102



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN BEBAS  
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Imran Rosidi*  
NIM : *217130102*  
Tempat/Tgl Lahir : *Lantern, 23 Juli 1998*  
Program Studi : *Ilmu pemerintahan*  
Fakultas : *FisPol*  
No. Hp : *087-819 742 838*  
Email : *rosidiimran273@gmail.com*

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis\* saya yang berjudul :

*Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Kesejahteraan masyarakat Di Desa Suwangi Timur Kecamatan Sekera Kabupaten Lombok Timur Di Masa Pandemi Covid 19*

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. *96%*

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis\* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, *15 Maret* 2022  
Penulis



*Imran Rosidi*  
NIM. *217130102*

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



*Iskandar, S.Sos., M.A.*  
NIDN. 0802048904

\*pilih salah satu yang sesuai



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM  
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram  
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : [perpustakaan@ummat.ac.id](mailto:perpustakaan@ummat.ac.id)

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN  
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imron Rosidi  
NIM : 217130102  
Tempat/Tgl Lahir : Lantana, 23 Juli 1998  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : Fisipol  
No. Hp/Email : 087 819 742 838  
Jenis Penelitian :  Skripsi  KTI  Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap  
Kejahatan Masyarakat Di Desa Sewangi Timur Kecamatan  
Sakra Kabupaten Lombok Timur Di Masa Pandemi Covid 19

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 15 Maret 2022  
Penulis

Imron Rosidi  
NIM. 217130102

Mengetahui,  
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT

Iskandar, S.Sos., M.A.  
NIDN. 0802048904

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

#### **“Kesulitan dan Kemudahan”**

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.” QS Al Insyirah 5

“Dan ketahuilah, sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran.

Jalan keluar beriringan dengan kesuksesan. Dan sesudah kesulitan pasti akan datang kemudahan.” (HR.Tirmidzi)

#### Persembahan:

“Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan jalan kemudahannya sehingga saya bisa sampai di titik ini dan tak lupa juga saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya yang selalu membimbing, mendukung maupun mensupport saya yang selalu menjadi motivasi bagi saya sehingga saya bisa sampai di titik ini dan saya juga berterimakasih kepada dosen pembimbing, baik pembimbing 1 dan pembimbing 2 yang dengan ikhlas hati membimbing saya selama ini sehingga saya bisa sampai di titik ini, dan juga saya berterima kasih kepada orang-orang terdekat saya yang selalu memberikan saya masukan maupun arahan kepada saya selama di bangku perkuliahan dan kalian tetap dalam lindungan Sang Khalik”

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun skripsi yang berjudul “Implementasi program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Suwangi Timur kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur dimasa pandemic covid 19” dapat di selesaikan dengan baik.

Dalam kesempatan ini, peneliti menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd. Gani.,M.Pd Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram dan Jajarannya.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Ali, M.Si Selaku Dekan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Ayatullah Hadi, S. IP., M. IP Selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan
4. Bapak Drs. AMIL,M.M Selaku Dosen Pembimbing I
5. Bapak Aprian Jailani, S. AP., M. AP. Selaku Dosen pembimbing II , terima kasih atas segala keikhlasan dan kesabaran dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan pada khususnya dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada umumnya yang telah memberikan bekal Ilmu pengetahuan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi dan penulis skripsi ini.



7. Kedua Orang Tua saya yang sangat berjasa dan selalu mendoakan dan memberikan dukungan tanpa lelah sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan harapan.

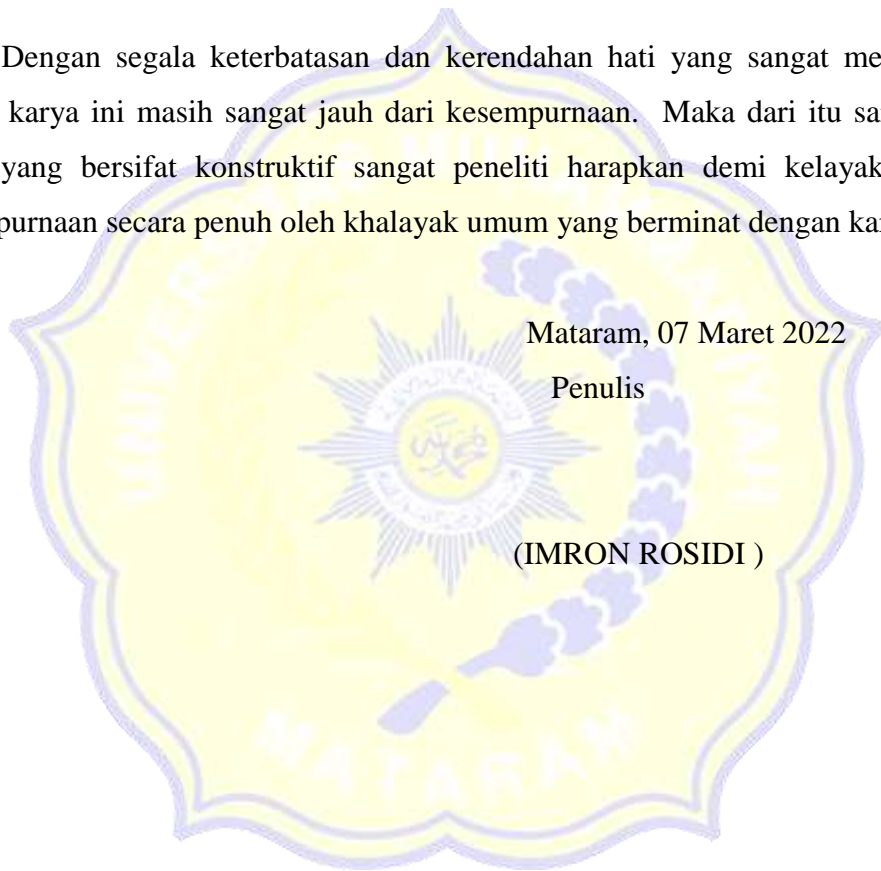
8. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan dan semua pihak yang telah banyak memberikan masukan kepada peneliti baik selama mengikuti perkuliahan maupun dalam penyusunan Skripsi.

Dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati yang sangat menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat peneliti harapkan demi kelayakan dan kesempurnaan secara penuh oleh khalayak umum yang berminat dengan karya ini.

Mataram, 07 Maret 2022

Penulis

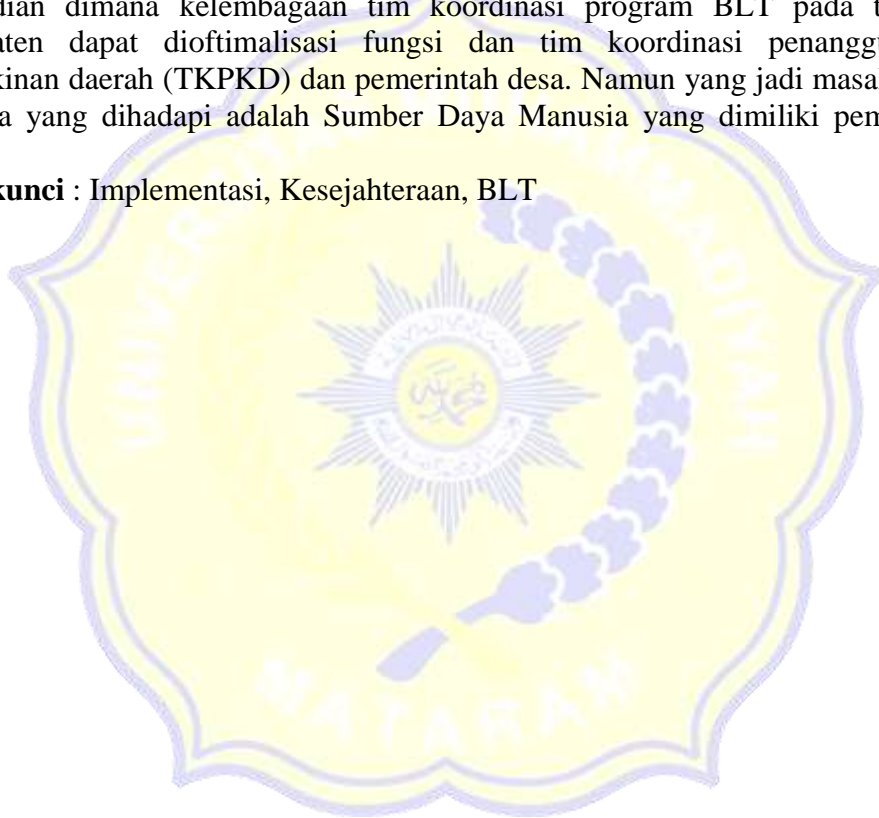
(IMRON ROSIDI )



## ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di desa Suwangi Timur kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Suwangi Timur kecamatan Sakra kabupaten Lombok Timur. Adapun aspek yang diteliti secara garis besar meliputi implementasi program bantuan langsung tunai (BLT) dan faktor pendukung dan penghambat implementasi. Metode penelitian yang di gunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui cara observasi dan wawancara, di tunjang pula dengan studi dokumentasi. Hasil penelitian tersebut menunjukkan implementasi program bantuan lansung tunai pada masyarakat miskin di desa Suwangi Timur Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur. Meliputi komunikasi yaitu sosialisasi program BLT dimana tingkat keberhasilan jika informasi sampai tingkat paling bawah dari sasaran tersebut. Kemudian dimana kelembagaan tim koordinasi program BLT pada tingkat kabupaten dapat dioptimalisasi fungsi dan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah (TKPKD) dan pemerintah desa. Namun yang jadi masalah satu kendala yang dihadapi adalah Sumber Daya Manusia yang dimiliki pemerintah desa.

**Kata kunci :** Implementasi, Kesejahteraan, BLT



## ABSTRACT

### DIRECT CASH ASSISTANCE IMPLEMENTATION ON THE COMMUNITY WELFARE OF EAST SUWANGI VILLAGE, SAKRA DISTRICT, EAST LOMBOK DURING THE COVID-19 PANDEMIC

Imron Rosidi, Drs. Amil,M.M, M. Aprian Jailani,S,AP.,M.AP

This study was located in East Suwangi village, Sakra district, East Lombok regency. The purpose of this study is to see how the direct cash assistance (BLT) program was implemented in East Suwangi Village, Sakra sub-district, East Lombok Regency. The execution of the direct cash assistance program (BLT) as well as the supporting and inhibiting variables of implementation were all investigated. The research method was descriptive qualitative, utilizing data collection techniques such as observation and interviews, as well as documentation studies to back up the findings. The findings of this study show that in the East Suwangi village, Sakra District, East Lombok Regency, the implementation of the direct cash assistance program for the poor includes communication, specifically the socialization of the BLT program, with the highest success rate if the information reaches the lowest level of the target. The functions of the regional poverty reduction coordination team (TKPKD) and the village government can then be optimized where the institutional coordination team for the BLT program at the district level can be optimized. However, the village government's Human Resources are a difficulty or an impediment.

**Keywords:** *Implementation, Welfare, BLT*

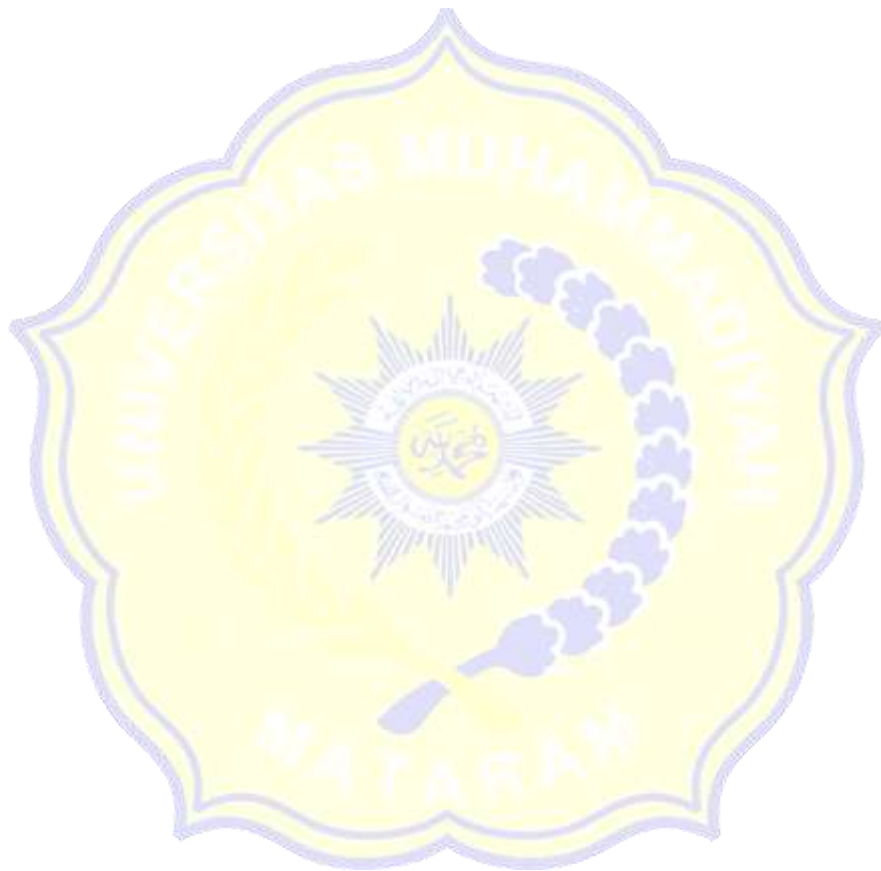


## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PLAGIARISME .....</b>	<b>v</b>
<b>PUBLIKASI KARYA ILMIAH .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.4. Manfaat Penelitian .....	6
1.4.1. Secara teoritis .....	6
.....	
1.4.2. Secara praktis .....	7
1.4.3. Secara akademik.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
2.1 Penelitian Terdahulu .....	8
2.2 Penelitian Relevan .....	8
2.3 Implementasi kebijakan .....	15
2.3.1. Model-model implementasi kebijakan.....	16
2.4. Konsep Kemiskinan .....	20

2.5. Konsep bantuan langsung tunai .....	22
2.6 Konsep kesejahteraan.....	27
2.7 Kerangka berpikir .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
3.1. Jenis penelitian .....	30
3.2. Fokus Penelitian .....	31
3.3. Lokasi Penelitian.....	31
3.4. Jenis dan sumber data .....	31
3.4.1 Jenis data.....	31
3.4.2. Sumber data .....	32
3.5. Teknik pengumpulan Data .....	33
3.6. Teknis Analisis Data .....	35
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
4.1. Landasan Umum dan Lokasi Penelitian .....	38
4.1.1. Gambaran umum dan Lokasi Penelitian Sejarah Desa Suwangi Timur.....	38
4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	45
4.2.1. Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Suwangi Timur Kecamatan Sakra.....	45
4.2.2. Faktor pendukung dan Penghambat Implementasi Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Suwangi Timur Kecamatan Sakra.....	60

<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>65</b>
5.1. Simpulan.....	65
5.2. Saran.....	66
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

BLT Singkatan dari bantuan langsung tunai adalah program bantuan pemerintah yang memberikan bantuan tunai bersyarat (*conditional cash transfer*) dan tanpa syarat (*unconditional cash transfer*) atau berbagai bantuan lainnya kepada masyarakat miskin. Transfer tunai pertama kali dibuat di Brasil pada 1990-an dengan nama Bolsa Escola dan berganti nama menjadi Bolsa Familia

Program tersebut merupakan bantuan tunai bersyarat yang diprakarsai oleh Presiden ke-35 Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva. Bolsa Familia masih eksis hingga saat ini sebagai bantuan tunai bersyarat terbesar di dunia, setelah berhasil membantu sekitar 26 persen penduduk miskin Brasil pada tahun 2011, dan program tersebut telah direplikasi di negara-negara lain.

Di Indonesia sendiri BLT Hadir Pada tahun 2004, sebagai imbas dari kepastian informasi yang di Sampaikan oleh Pemerintah terkait kenaikan harga minyak dunia. Sehingga di perlukanya kebijakan untuk memotong subsidi Minyak. Hal ini dilakukan dengan alasan BBM bersubsidi lebih banyak digunakan oleh orang-orang dari kalangan industri dan berstatus mampu. Sehingga di nilai kurang efektif dari tujuan di berlakukanya Subsidi Minyak tersebut.

Demi menanggulangi efek kenaikan harga BBM yang akan berimpas dengan Kenaikan harga berbagai kebutuhan Sekunder atau pun Primer, tentu

hal ini akan menjadi masalah baru bagi kelompok masyarakat miskin, maka dari itu pemerintah memperkenalkan program BLT kepada masyarakat untuk pertama kalinya pada tahun 2005.

Program ini dimulai oleh Yusuf Kalla sesaat setelah memenangkan pemilihan umum Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Indonesia pada tahun 2004. Terakhir, program bantuan tunai langsung tanpa syarat diluncurkan dari Oktober hingga Desember 2005, berdasarkan Instruksi Presiden No. 12. Pada tahun 2006, kami menargetkan keluarga miskin 192 juta jiwa.

Berdasarkan kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, diketahui bahwa pada masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Perpres ini menetapkan bahwa pemerintah akan menetapkan program perlindungan sosial untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, antara lain: (a) Program Tabungan Keluarga Sejahtera, (b) Program Indonesia Pintar, (c) Program Indonesia Sehat (Murdiyana dan Mulyana, 2017:87).

Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan berlanjut di bawah periode kedua Joko Widodo. Salah satu bentuk perlindungan sosial tersebut adalah melalui bantuan tunai langsung kepada masyarakat kurang mampu di masa pandemi Corona yang dikenal dengan sebutan covid-19. Pandemi Covid-19 terutama berdampak pada sektor ekonomi. Banyak perusahaan yang harus gulung tikar karena tidak bisa lagi memproduksi dan ratusan ribu karyawan di



PHK dari tempat mereka mencari hubungan kerja beras (PHK). Karena itu, jumlah orang miskin semakin bertambah, sehingga sikap pemerintah sangat dinantikan. (dialihkan dari 2020)

Menurut Kementerian Desa, dana desa yang ditujukan untuk BLT adalah sekitar 31 persen dari jumlah total 72 triliun rupiah atau 22,4 triliun rupiah. Program ini akan disebar di antara 12,3 juta kepala keluarga (KK) yang terkena Covid-19, dan akan diserahkan kepada kepala desa dan pemerintah desa. Pembagian BLT dibagi menjadi tiga tingkat tergantung pada jumlah dana desa. Pertama, untuk desa-desa dengan anggaran kurang dari 800 juta rupiah dibagikan 25 persen BLT. Kedua, desa-desa dengan anggaran dari 800 juta hingga 1,2 miliar rupiah Indonesia memberikan 30 persen dari BLT. Dan yang ketiga adalah desa dengan anggaran lebih dari 1,2 miliar rupiah Indonesia, yang dibagikan 35 persen. Untuk alasan ini perlu dipertimbangkan APDes (budget pendapatan dan perbelanjaan desa) dengan rujukan Permendagri No 69 dari 2018. Dana desa akan berfokus pada tiga hal, yaitu melawan Covid-19, program kerja intensif desa tunai dan BLT.

Dalam rangka pandemi Covid-19, BLT diberikan kepada masyarakat miskin untuk menjaga daya beli masyarakat dan kepada kelompok pelaku usaha untuk menjaga kelangsungan usaha dan meminimalisir dampak pemutusan hubungan kerja (PHK). Mengingat karakteristik masyarakat miskin dan rentan yang berbeda di Indonesia, pemerintah tidak dapat menerapkan mekanisme tunggal untuk menargetkan dan mengalokasikan BLT. Besaran BLT yang diberikan sebesar Rp. 600.000 per bulan.

Kebijakan bantuan tunai ini dilaksanakan untuk menjaga daya beli masyarakat miskin di masa pandemi virus corona (Covid-19).

Jangka waktu alokasi BLT ini adalah 3 (tiga) bulan, terhitung dari bulan April sampai dengan Juni. Penerimaannya adalah keluarga miskin yang bukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan tidak memiliki kartu sembako dan kartu prakerja. Penerima BLT berdasarkan Data Komprehensif Kesejahteraan Sosial (DTKS). Penataan mekanisme pendataan, penetapan data penerima bantuan, dan pelaksanaan subsidi BLT desa dilakukan sesuai dengan peraturan kepala desa tentang PDTT. Dengan persetujuan kabupaten/kota, anggaran APBDes BLT mencapai 35% atau lebih dari dana desa. Menyederhanakan dokumen, mempercepat penyaluran dana tingkat desa, dan mempercepat penyaluran. Walikota desa bertanggung jawab atas penggunaan, pendistribusian, dan pertanggungjawaban BLT Desa. BLT Dana Desa merupakan program prioritas yang harus dianggarkan oleh pemerintah desa. Apabila pemerintah desa tidak menganggarkan BLT dana desa, maka pemerintah desa akan mengurangi dana desa sebesar 50% untuk penyaluran tahap selanjutnya hingga berakhirnya penyaluran dana desa tahap III. dari. .. Dukungan dan pengawasan terhadap penggunaan BLT Dana Desa dapat diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah. (Iping, 2020).

Di NTB penerima BLT sebanyak 1.171.200, terdiri 348.892 rumah tangga miskin, 1.644.523 rumah tangga miskin dan 1.227.793 rumah tangga hampir miskin, adapun BLT selama covid-19 adalah bantuan sembako, bantuan sosial tunai, BLT dana desa, Listrik gratis, kartu prakerja, subsidi gaji karyawan dan BLT usaha mikro kecil.

Berdasarkan hasil observasi awal bahwa program BLT di Desa Suangi Timur kecamatan Sakra tidak tepat sasaran, karena saya berpikir dalam diadakan BLT ini tidak efisien karena untuk mendorong pola hidup masyarakat yang malas, BLT ini juga dapat menciptakan masyarakat lebih tidak ingin kerja karena pemerintah hanya memberikan uang hingga masyarakat yang kurang untuk merealisasikan program BLT. Dan pemerintah juga pengurus setempat yang banyak tahu kondisi daerah masing-masing, BLT ini juga bisa akan menimbulkan terjadinya konflik antar kelompok. Angka kemiskinan, kriminal, pembunuhan di berbagai masyarakat juga akan meningkat

Dengan data yang di himpun di atas terkait Profil desa suwangi timur dengan di padukan oleh kondisi Pandemic Covid 19, Beserta kebijakan Bantuan Langsung Tunai yang memiliki tujuan untuk membantu Masyarakat yang terdampak Pandemi. Dengan Latar Belakang di atas penulis mengangkat tema “Implementasi Bantuan langsung tunai terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Suwangi Timur di Masa Pandemi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang yang telah di uraikan, maka penulis dapat merumuskan rumusan Masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi program Bantuan Lansung Tunai (BLT) didesa Suangi Timur Kecamatan Sakra?
2. Apa sajakah pendukung dalam pelaksana program bantuan lansung tunai (BLT) di desa Suangi Timur Kecamatan Sakra?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Bedasarkan Rumusan Masalah di atas maka yang menjadi tujuan penelitian adalah

1. Untuk Mengetahui dan menganalisis langkah Pemerintah Desa dalam menjamin Efektifitasnya Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT)
2. Untuk mengetahui dampak Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Suwangi Timur.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat dalam penelitian ini dapat di bagi menjadi dua (3) bagian yaitu Manfaat Secara Teoritis, Manfaat Secara Akademik dan Manfaat Secara Praktis. Adapun Uraian Masing masing manfaat penelitian tersebut diatas yaitu.

#### **1.4.1. Secara Teoritis**

a. Penelitian ini di harapkan bisa menjadi Sumbangsih pengetahuan baru terhadap Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram.

b. Mengembangkan Ke Ilmuan yang telah di dapatkan di bangku Perkuliahan dan Menambah Pengetahuan bagi pembaca terkait bantuan Langsung Tunai dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat desa Suwangi pada masa pandemi Covid 19 .

#### **1.4.2. Secara Praktis**

a. Bagi pemerintah, sebagai masukan untuk merumuskan

Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT).

- b. Bagi masyarakat, sebagai sumber informasi dan pengetahuan bagi masyarakat yang belum mengenal Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT).

#### **1.4.3. Secara Akademik**

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memenuhi salah satu Persyaratan untuk mencapai Studi (S.1) Pada jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram dan dapat Memberikan kontribusi Ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi perguruan tinggi.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan bagi penulis untuk melakukan penelitiannya sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan untuk mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian sebelumnya, penulis menemukan penelitian dengan judul yang sama dengan penelitian penulis. Namun penulis menghadirkan beberapa penelitian sebagai referensi untuk memperkaya bahan penelitian dalam penelitian penulis. Di bawah ini adalah penelitian-penelitian sebelumnya di beberapa jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

#### 2.2 Penelitian Relevan

Tabel 2.2. Pemetaan Hasil Penelitian Terdahulu

NO	Nama Penelitian dan Tahun	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan dan persamaan
1.	Nuniek Dewi Pramani,	Dampak Bantuan Paket Sembako Dan	Hasil studi yang dilakukan selama ini menunjukkan implementasi dari	Adapun perbedaan dari jurnal ini adalah peneliti terdahulu menggunakan metode

	2020	<p>Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kelangsungan Hidup Masyarakat Padalarang Pada Masa Pandemi Covid 19 (Study Kasus Kecamatan Padalarang)</p>	<p>program bantuan sosial pemerintah, terutama aspek penyalurannya, menghadapi beberapa tantangan seperti: (a) pencairan dana kepada penerima manfaat yang tepat; (b) penyaluran nilai dan jumlah bantuan yang tepat; dan (c) durasi program.</p>	<p>penelitian berbentuk kasual, yaitu penelitian untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat sedangkan penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, sedangkan persamaan dari jurnal ini adalah sama-sama membahas masalah penyaluran BLT, apakah panyalurannya udah tepat sasaran apa tidak.</p>
--	------	---	---	--

2.	Wongkar Lusye, C.C, 2021	Bantuan Langsung Tunai Pemerintah Kepada Masyarakat yang terkena dampak Pandemi Covid 19 (Studi Di Kelurahan Kakasen 1)	Bantuan Langsung Tunai adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, bersyarat maupun tidak bersyarat untuk masyarakat miskin. Bantuan Langsung Tunai sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,	Berkaitan dengan penulisan skripsi ini, peneliti mengumpulkan data dari wawancara masyarakat, sedangkan penulis mengumpulkan data dengan metode kualitatif dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan persamaan dari kedua skripsi ini adalah menginginkan masyarakat hidup sejahtera dan jauh dari angka kemiskinan serta pengangguran.
----	--------------------------------	--	---	--



			<p>dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan diperpanjang masa penyaluran dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.</p>	
3	Zakiah, 2013	<p>Perempuan dan kemiskinan (studi kasus kehidupan perempuan sebagai Buruh Bangunan di Desa</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehidupan perempuan sebagai buruh bangunan di Desa Tropodo sangat melekat dengan kemiskinan struktural, mereka menjadi buruh</p>	<p>Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama-sama membahas masalah kemiskinan yang menyebabkan kebutuhan konsumsi dasar ( pangan, sandang dan papan) belum tercukupi</p>

	Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)	bangunan karena himpitan ekonomi keluarga dan tradisi atau kebiasaan dalam menjalani pekerjaan sebagai buruh bangunan akibat rendahnya tingkat pendidikan yang hanya mampu tingkat SD	sedangkan perbedaan dari penelitian sekarang dengan yang terdahulu yakni penulis lebih condong dan lebih focus membahas masalah penyaluran BLT sedangkan yang terdahulu lebih focus cara menstabilkan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat.
--	--	--	---

**Sumber:** Jurnal Nasional ( 2013,2020,2021)

Kemampuan mengidentifikasi informasi pelaksanaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Suangi Timur, Jalan Sakra, Suangi Timur, sebelumnya telah diteliti oleh beberapa peneliti, di antaranya nunieq dewi permanik (2020) bertajuk “Bantuan Sembako dan Bantuan Langsung Tunai Implikasinya Bagi Kelangsungan Hidup Masyarakat Padalarang Selama Pandemi Covid 19”.

Berdasarkan temuan berikut: (a) Pembayaran dana kepada penerima manfaat yang sesuai. (B) Distribusi nilai dan dukungan yang tepat. (C) Periode program. Untuk mendukung efektivitas penyaluran program bansos pemerintah, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Penduduk

(Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri bekerja sama dengan Pemerintah Daerah (PEMDA) menjadi penerima manfaat. Melalui Data Kesejahteraan Sosial Terpadu (DTKS), database yang digunakan untuk penyaluran bansos nasional, Sekda Dukcapil akan menggunakan data kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan penerima bantuan ke DTKS. Pembagian tersebut dianggap benar karena diyakini ada berdasarkan NIK. (Pramanik1, 2020)

Selain itu, survei Claudia Clara Lusye Wongkar (2021) dengan bantuan langsung tunai pemerintah (survei di Desa Kakasen 1) kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid 19: bantuan UMKM, kartu prakerja, Termasuk subsidi gaji. , Bantuan Kredit Listrik PLN, Bantuan Langsung Tunai, Bantuan Sosial Beras, ASN, Uang Pulsa untuk siswa, siswa, guru, guru. 5 Ini merupakan stimulus yang disalurkan kepada masyarakat oleh pemerintah pusat. Dengan memberikan bantuan, Anda dapat mengurangi kebutuhan Anda yang ada. Selama pandemi Covid-19, kebutuhan semua orang terbatas

Perusahaan telah memberhentikan karyawan karena perilaku konsumen yang berkurang secara signifikan di masyarakat, kurangnya produksi dan distribusi barang, dan kurangnya pasokan dan permintaan di pasar global. Sejak tahun 2004, pemerintah Indonesia telah memberikan bantuan tunai langsung. Palsunya, data yang disurvei pengguna BBM bersubsidi dari industri kaya dan industri. Akibatnya, harga bahan pokok naik. Untuk itu, pemerintah memperkenalkan program BLT kepada masyarakat pada tahun

2005 untuk mengatasi dampak terhadap masyarakat miskin tersebut.

Hal itu berlanjut pada 2019-2020 dalam menghadapi bencana non alam, pandemi Covid-19, karena pemerintah siap memberikan dukungan kepada masyarakat yang terkena dampak. Penegakan peraturan ini akan membantu masyarakat mengurangi kemiskinan dan mengurangi biaya hidup. Pada kategori bencana non alam saat ini, penyalurannya berdasarkan peraturan yang diberlakukan oleh Menteri Peraturan Desa dan juga diatur oleh Menteri Perbendaharaan.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Keimigrasian Republik Indonesia Pasal 6, Perubahan Peraturan Menteri Desa, Pengembangan Daerah Tertinggal, dan Prioritas Penggunaan Imigrasi Tahun 2019 Nomor 11 Tahun 2020 Dana Desa. Aturan ini diubah karena didasarkan pada aturan pemerintah, bukan kebijakan fiskal pertama 2020 tentang kebijakan fiskal tentang pengobatan dan penyebaran penyakit virus corona desa (COVID-19) yang menyebar melalui penggunaan desa. Beberapa peraturan desa yang diatur menteri, pembangunan daerah tertinggal, dan keimigrasian nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020, karena dana tersebut dapat langsung digunakan untuk bantuan tunai kepada warga desa yang kurang mampu. perlu disesuaikan. (Wongkar2, 2020)..

### **2.3 Implementasi kebijakan**

Menurut Edwards (2005: 54), melakukan studi sangat penting bagi pemerintah dan kebijakan publik. Implementasi kebijakan adalah tahapan pembuatan kebijakan dan merupakan hasil dari kebijakan dan masyarakat

yang terkena dampaknya. Suatu kebijakan yang tidak tepat atau tidak dapat memitigasi masalah yang menjadi sasaran kebijakan akan gagal meskipun kebijakan tersebut diterapkan dengan benar. Juga, jika kebijakan tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, kebijakan yang sudah baik bisa gagal. Menurut pemerintah. Pelaksana kebijakan.

Menerapkan suatu kebijakan merupakan langkah yang sangat baik dalam proses kebijakan. Dalam sebuah implementasi, sebuah kebijakan hanyalah sebuah dokumen yang tidak masuk akal bagi kehidupan masyarakat, atau sebuah kebijakan dalam bentuk mimpi atau rencana yang baik, dan jika tidak diimplementasikan maka akan terarsip dengan rapi. Pada titik ini, implementasi kebijakan atau prosedur implementasi sudah sangat baik, namun bukan berarti terpisah dari proses pembangunan sebelumnya. Dengan kata lain, rumusan kebijakan makro yang ditetapkan adalah pelaksana kebijakan mikro, yaitu kebijakan kelompok sasaran dan kebijakan operasional dalam memperhatikan lingkungan. Selain itu, kebijakan yang tidak jelas merupakan penyebab pertama kegagalan implementasi (Wahab, 2001: 185).

### **2.3.1 Model-Model Implementasi Kebijakan**

Kebijakan publik tidak memiliki tiga komponen dasar, yaitu (1) apa yang ingin dicapai, (2) tujuan khusus, dan (3) bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Pendekatan untuk mencapai tujuan ini sering disebut sebagai implementasi dan sering diterjemahkan ke dalam rencana aksi dan proyek. Kegiatan implementasi tersebut seringkali meliputi: keberhasilan pelaksana, jumlah dan sumber pendanaan, siapa kelompok sasaran, terlepas dari proyek atau manajemen proyek, dan karena

keberhasilan suatu proyek atau proyek dapat diukur dengan jelas, pelaksanaan kebijakan adalah bagaimana kebijakan tersebut dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Tujuan kebijakan pada dasarnya adalah intervensi. Oleh karena itu, implementasi kebijakan sebenarnya merupakan intervensi (Wahab, 2001:23).

Menurut Kismartini ddk (2005: 21-23), macam-macam implementasi kebijakan yaitu sebagai berikut:

1. Model Merrilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi Merrilee S. Grindle tergantung pada isi implementasi lingkungan politik. Ide utamanya adalah untuk mengimplementasikan kebijakan setelah diterjemahkan.

Kebijakan sesuai dengan semua manfaat polis, jenis dan tingkat manfaat yang dibuat. Perubahan yang diinginkan; sumber daya yang dikerahkan. Dengan demikian, lingkungan (isi implementasi) menyerap kekuatan, kepentingan, dan strategi para aktor yang terlibat. Kepribadian institusional dan dominan, serta ketaatan dan daya tanggap.

2. Model George C. Edward III

Selanjutnya, George C. Edward III mengajukan beberapa variabel yang dipengaruhi oleh implementasi kebijakan: komunikasi, sumber daya, kecenderungan, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling terkait. Variabel-variabel tersebut dijelaskan oleh Edwards (2005:87) sebagai berikut:

- 1). Komunikasi

Dalam variabel komunikasi ini, Edwards secara garis besar

menggambarkan tiga poin kunci dalam proses komunikasi kebijakan: komunikasi, konsistensi, dan kejelasan. Menurut Edwards, kondisi awal untuk implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa orang membuat keputusan dan tahu apa yang harus dilakukan. Keputusan dan instruksi kebijakan dapat dieksekusi dalam kelompok yang sesuai, dan kemudian keputusan dan instruksi ini dapat dikenali. Komunikasi bisa akurat. Proses komunikasi memiliki banyak kendala dalam komunikasi implementasi dan juga dapat menghambat implementasi kebijakan. Bukan dari komunikasi tentang petunjuk pelaksanaan, itu adalah masalah koherensi keputusan yang saling bertentangan, lebih banyak kebingungan dan halangan oleh staf administrasi, dan hambatan terhadap kemampuan untuk mengimplementasikan kebijakan dengan benar.

2). Sumber-sumber

Sumber-sumber tersebut merupakan salah satu sumber bagi pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan jalan dengan baik. Sumber yang baik meliputi kemampuan, informasi, kewenangan, dan fasilitas yang diperlukan untuk menyelenggarakan pelayanan publik, serta staf yang sesuai. Dan, tergantung pada sumbernya, kebijakan berbasis kertas bisa menjadi rencana dan tidak pernah menjadi kenyataan.

3). Disposisi

Beberapa metode yang dipengaruhi oleh efektifitas implementasi yaitu respon dari pelaksana. Dengan begitu, pelaksana setuju dengan kebijakan yang dilakukan orang tersebut dengan baik, tetapi jika gagasan masyarakat berbeda dengan pembuat kebijakan, proses implementasi dapat menimbulkan banyak masalah.

Ada tiga pelaksana sikap/tanggapan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Jika pelaksana mengetahui, petunjuk/petunjuk pelaksanaan dapat merespon program dengan cara menerima atau menolak, yang merupakan kekuatan respon. Kedua, implementasi perlu memiliki pemahaman yang benar tentang itu dan tujuan program. Hal ini dikarenakan masyarakat yang menolak tujuan yang terkandung di dalamnya dapat diam-diam berkembang biak dan menghindari pelaksanaan program. Dukungan ini sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan pelaksana program untuk membantu mereka mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

#### 4). Struktur birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu lembaga yang melaksanakan kebijakan. Pada hakekatnya pelaksana suatu kebijakan dikenal sebagai seseorang yang memiliki keterampilan, keinginan, dan sumber daya untuk melaksanakan dan melaksanakannya, tetapi untuk melakukannya, melakukan kegiatan tersebut masih terdapat kendala struktur organisasi yang harus dilakukan. Menurut Edwards, birokrasi memiliki dua ciri awal: langkah-langkah untuk mengukur kinerja.

## 2.4 Konsep Kemiskinan

Kemiskinan adalah konsep dan fenomena yang multifaset. Kemiskinan secara luas didefinisikan berdasarkan kondisi ekonomi, terutama pendapatan berupa barang dan manfaat immaterial yang diterima



masyarakat. Kemiskinan berada di bawah nilai rendah baik penghidupan maupun kebutuhan minimum lainnya dan dapat disebut sebagai garis kemiskinan atau ambang batas kemiskinan (Suharto, 2008: 21).

Kemiskinan adalah kekurangan makanan, pakaian, perumahan, air minum, kebutuhan sehari-hari, dan hal-hal lain yang tidak dapat dimiliki orang. Kemiskinan berarti kurangnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang dapat mengatasi masalah kemiskinan dan memberikan kehormatan yang layak bagi masyarakat, tetapi pada saat yang sama pangan, kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, perumahan dan air bersih. , Sumber daya alam dan lingkungan. Lingkungan, perlindungan lahan, kenyamanan, dan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pembangunan. Demikian pula pemenuhan hak kependudukan erat kaitannya dengan pembangunan daerah dengan laju pembangunan pedesaan yang pesat, pengaktifan pembangunan perkotaan, pembangunan daerah pesisir, dan pembangunan daerah tertinggal (Parsons, 2005: 76).

Kemiskinan memiliki beberapa ciri, yaitu sebagai berikut:

1. Tidak mampu terpenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang, dan papan)
2. Tidak ada akses pada kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, rumah, air bersih dan transportasi).
3. Tidak ada jaminan masa selanjutnya (karena tidak ada dana untuk pendidikan dan keluarga)
4. Kurangnya terhadap guncangan yang bersifat individual maupun massal.
5. Sedikitnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber daya alam.

6. Tidak termasuk dalam kegiatan sosial masyarakat.
7. Tidak ada akses pada lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkelanjutan.
8. Kurang mampu untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
9. Tidak mampu dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindakan kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal, dan terpencil) (Suharto, 2008: 14).

## **2.5 Konsep Bantuan Langsung Tunai (BLT)**

BLT, kependekan dari Bantuan Langsung Tunai, adalah uang tunai atau berbagai bantuan lain yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin, baik bersyarat (conditional cash transfers) maupun tanpa syarat (unconditional cash transfers). Negara pertama yang memprakarsai BLT adalah Brasil pada tahun 1990-an, saat itu bernama Bolsa Escola, dan kemudian berubah nama menjadi Bolsa Familia, yang diprakarsai oleh Presiden Brasil ke-35, Luis Inacio Lula da Silva. Sejak saat itu, BLT diadopsi oleh negara lain, dan besaran BLT yang diberikan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah masing-masing.

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang menyelenggarakan BLT. Mekanisme Indonesia berupa pemberian santunan tunai, pangan, jaminan kesehatan dan pendidikan dengan tiga tingkatan tujuan: dekat dengan masyarakat miskin, miskin dan sangat miskin. Namanya dalam Bantuan Sementara Masyarakat (BLSM). Program BLT saat itu digelar untuk merespons kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) di seluruh dunia.

Banyak kontroversi mengenai penerapan BLT di Indonesia. Ada yang mengatakan BLT adalah alat untuk mendongkrak popularitas sebelum pemilu, menipu bangsa, dan menambah beban utang. Konflik yang ada terus eskalasi hingga terjadi demonstrasi dan debat politik. Di tengah pandemi virus corona yang menyebabkan jatuhnya perekonomian, BLT ditujukan kepada masyarakat miskin yang kehilangan pekerjaan. Selain itu, pemerintah juga akan memberikan BLT kepada masyarakat yang keluarganya sakit kronis. Per 8 Mei 2020, pendataan sudah dimulai di 27.062 desa yang menjadi penerima BLT desa. Kemudian ada 24.309 desa yang telah mengalokasikan anggaran desa untuk BLT, dan 10 ribu di antaranya telah mengalokasikan dana desa untuk BLT.

Adapun jenis pemberian BLT ini adalah uang tunai sebesar Rp600 ribu per bulan untuk setiap keluarga.

#### 1. Jenis Jenis Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Seperti diberitakan Presiden Joko Widodo, dia mengungkapkan dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp419,31 triliun dalam RAPBN 2021, program bantuan sosial lainnya akan berlanjut hingga 2021. Di bawah ini adalah program BLT yang akan berlanjut hingga tahun depan.

##### a. Subsidi Gaji Rp600 ribu

Bantuan pemerintah berupa subsidi upah sebesar Rs 600.000 diberikan melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi mereka yang memiliki upah di bawah Rs 5 juta. Pembayaran BLT ini dimulai pada 27 Agustus dan akan dilakukan bertahap hingga akhir September 2020. Penerima subsidi upah pegawai ini akan mendapatkan bantuan sebesar Rp

600.000 per bulan selama 4 bulan. Pembayaran dilakukan dalam 2 kali angsuran atau Rp 1,2 juta per tangan.

b. Kartu Prakerja

Program Kartu Prakerja dibuat oleh pemerintah untuk membantu para pekerja Indonesia yang menganggur dan diberhentikan. Peserta program ini mendapatkan dukungan insentif pelatihan vokasi sebesar Rp 1 juta per bulan untuk membayar pelatihan online kartu pra kerja.

c. BLT UMKM

Dukungan pemerintah melalui BLT UMKM bertujuan agar pelaku usaha UMKM tetap eksis. Skema ini merupakan pembayaran dukung UMKM sebesar Rp2,4 juta yang dikirim melalui rekening.

d. Bansos Tunai

Terakhir, ada bantuan tunai yang akan berlanjut hingga tahun depan. Melalui Kementerian Kesejahteraan Sosial, pemerintah menyalurkan bantuan sosial berupa bantuan sosial tunai (BST) senilai Rp500.000 atau Rp500.000 kepada mereka yang bukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH).

2. Kekurangan dan Kelebihan Bantuan Langsung Tunai (BLT)

a. Kekurangan

Beberapa di dalam negeri menganggap BLT Indonesia lebih unggul dan memuaskan. Namun sebenarnya banyak kritikan terhadap teknis pelaksanaan BLT ini karena menggunakan data lama, sehingga tidak terasa terdistribusi. Kemudian, hal ini seringkali menjadi peluang terjadinya korupsi dan kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat

dan pemerintah daerah. Selain itu, besaran nominal pemberian BLT tidak berdampak signifikan terhadap kesulitan yang dihadapi masyarakat miskin. Terakhir, program BLT disinyalir menimbulkan konflik sosial di masyarakat.

b. Kelebihan

Kelebihan BLT ini adalah sesuai dengan yang di sampaikan oleh Menteri Sosial RI yang menyebutkan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT), Mampu menurunkan Jumlah warga Miskin. Terbukti pada tahun 2009 angka kemiskinan berada dalam angka 35 juta menurun di bandingkan pada tahun 2007 yang berada pada angka 37 juta.

3. Tujuan dan Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Adapun Tujuan dan Manfaat dari Bantuan Langsung Tunai adalah sebagai Berikut :

1. Tujuan

- a. tujuan utama dari program ini adalah membantu masyarakat miskin untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya.
- b. Mendorng Ekonomi yang Efektif Karena berhubungan Langsung dengan Konsumsi Masyarakat

2. Manfaat.

- a. Membantu Memulihkan Segi Permintaan dari Masyarakat
- b. Membantu daya beli Masyarakat Yang pendapatnya berpotensi Menurun karena Pembatasan kegiatan ekonomi karena PSBB.

## 2.6 Konsep Pengertian kesejahteraan

Kesejahteraan adalah sistem terorganisasi dari layanan dan institusi sosial yang dirancang untuk membantu individu dan kelompok mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan serta hubungan pribadi dan sosial sehingga mereka dapat mencapai potensi penuh mereka dan meningkatkan kesejahteraan mereka sesuai dengan kebutuhan koordinasi mereka. dan masyarakat. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan sosial adalah terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara, memungkinkan mereka hidup secara wajar, mengembangkan diri, dan menjalankan fungsi sosial.

Kemakmuran atau kemakmuran dapat memiliki empat arti (Kamus Besar Bahasa Indonesia), secara umum kemakmuran mengacu pada keadaan kebaikan, keadaan di mana manusia berada dalam keadaan sejahtera, sehat dan damai. Dalam ilmu ekonomi, kemakmuran dikaitkan dengan keuntungan materi. Kemakmuran memiliki arti resmi atau teknis khusus (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah fungsi kesejahteraan sosial. Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial mengacu pada berbagai layanan yang memenuhi kebutuhan sosial. Ini adalah istilah yang digunakan dalam konsep negara kesejahteraan.

Badan Pusat Statistik (2000) menjelaskan bahwa ada beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran, antara lain tingkat pendapatan keluarga, untuk mengetahui tingkat kesejahteraan rumah tangga di daerah tersebut. Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan makanan dan bukan makanan, tingkat pendidikan

keluarga, tingkat kesehatan keluarga, dan kondisi perumahan milik rumah tangga dan pengeluaran fasilitas.

#### 1. Pengertian Kesejahteraan Menurut Ahli :

Adapun Pengertian dari kesejahteraan menurut para Ahli adalah:

a. Gertude Wilson

Kesejahteraan sosial menjadi perhatian bersama bagi semua orang.

b. Walter Friedlander

Kesejahteraan sosial adalah sistem institusi dan layanan sosial yang terorganisir yang dirancang untuk membantu individu atau kelompok mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih baik.

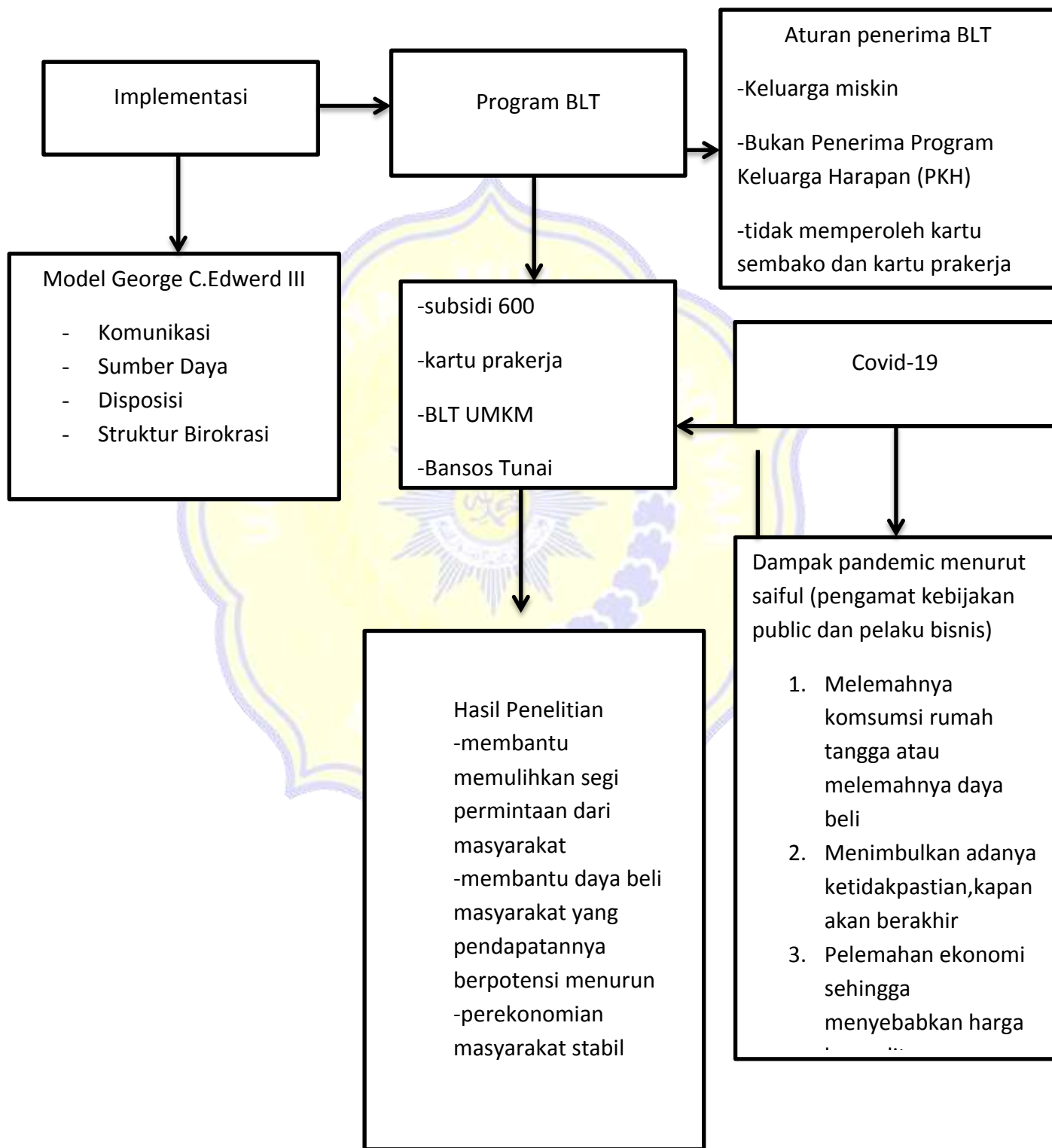
c. Elizabeth Wickenden

Jaminan sosial, termasuk undang-undang, program, manfaat dan pelayanan yang menjamin atau meningkatkan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan memelihara ketertiban dalam masyarakat.

d. Nasikun

Konsep sejahtera dapat dirumuskan sesuai dengan konsep Nasikum yang maknanya setara dengan konsep harkat dan martabat manusia yang dilihat dari empat indikator yaitu rasa aman, sejahtera dan kebebasan.

**Bagan 1**  
**Bagan Kerangka Berpikir**





## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Metode survei yang digunakan dalam survei ini adalah survei deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dipilih untuk menyajikan data secara sistematis, faktual dan akurat dari fakta-fakta di lapangan. Masyarakat di Desa Swangi Timur pada masa pandemi Covid19 dengan menggunakan desain survei deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Menurut David Williams dalam bukunya (Lexy J. Moleong: *Qualitative Research Methodology*. 2012), penelitian kualitatif adalah pengumpulan data dengan menggunakan metode-metode alami dalam suatu lingkungan alam dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik dengan alam. Definisi ini memperjelas bahwa penelitian kualitatif mengutamakan lingkungan alam, metode alami, dan dilakukan oleh orang-orang dengan masalah alam. (Sumber: Moleong, L.J. "Metodologi Penelitian Kualitatif" (2012)). Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif kualitatif adalah metode yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan hubungan antara variabel yang diteliti dengan mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data yang berupa benda-benda.

#### **3.2. Fokus Penelitian**

Karena penelitian ini ingin membatasi pada apa saja tergantung dari rumusan masalah dan tujuan dari rencana penelitian, maka fokus penelitian ini adalah "Pelaksanaan bantuan langsung tunai untuk

kesejahteraan masyarakat Desa Suanggi Timur, Sakurasab". Kabupaten COVID-19 pada tahun 2020 saat pandemi"

### **3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Survei ini dilakukan di desa Suanggi Timur di distrik Sakura. Saya memilih lokasi penelitian karena penelitian tentang program BLT belum pernah diteliti. Selain itu, kami memilih lokasi survei, Desa Suanggi Timur di distrik Sakura. Hal ini dikarenakan lokasi memudahkan peneliti untuk mendapatkan data.

### **3.4. Jenis Dan Sumber Data**

#### **3.4.1. Jenis Data**

Saat melakukan survei, diperlukan data yang akurat untuk membenarkan hasil survei. Ada dua jenis data dalam melakukan survei: data kualitatif dan data kuantitatif.

- a. Data kualitatif adalah jenis data yang menegaskan fakta dengan tanda-tanda kualitas yang dijelaskan dengan analisis sistematis dan logis.
- b. Data kuantitatif adalah data yang dapat menjelaskan masalah dan gejala sifat besaran. Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperjelas dan menjelaskan informasi yang dikumpulkan dari informan, yaitu data berupa teks, tindakan, dan foto-foto objek. <jam id = "0">

### 3.4.2. Sumber Data

Dari perspektif penelitian, sumber data dapat dibagi menjadi dua bagian:

a) Data primer merupakan sumber data yang memberikan data secara langsung kepada pengumpul data (Sugiyono, 2015). Wawancara dengan informan.

b) Data sekunder adalah sumber data yang tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul data (Sugiyono, 2015). Data sekunder untuk penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara merekam dan mengumpulkan data atau dokumen dari objek yang diteliti.

Jadi data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder sebagai pelengkap.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Beberapa metode pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang up-to-date dan lengkap. Metode berikut digunakan dalam penelitian ini:

#### 1. Observasi

Metode pengumpulan data observasi non partisipatif, yaitu jenis observasi dimana peneliti tidak terlibat langsung dalam semua kegiatan. Hal-hal yang akan diobservasi antara lain pelaksanaan bantuan tunai jaminan sosial langsung. warga Desa Suwangi Timur selama masa pandemi Covid 19.

## 2. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan dalam survei ini adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara, dan pertanyaan dan pertanyaan yang akan diajukan kepada orang yang diwawancarai sudah ditentukan sebelumnya. Tujuan wawancara dalam penelitian ini adalah untuk mengumpulkan informasi dan data terkait pelaksanaan bantuan tunai langsung untuk kesejahteraan masyarakat desa Swangi Timur selama masa pandemi Covid-19. Wawancara survei ini menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan informan dan subjek survei. masalah. Wawancara rinci dilakukan untuk mendapatkan data langsung melalui serangkaian tanya jawab dengan pemangku kepentingan terkait pelaksanaan proses penyaluran BLT di Desa Swangi Timur.

Wawancara responden:

1. Kepala Desa Suangi Timur Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur

Untuk itu sebelum melakukan wawancara peneliti menanyakan kepada narasumber mengenai waktu dan tempat wawancara

2. Sekretaris Desa Suangi Timur Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur

Selain itu, rencana penelitian mempersiapkan peneliti untuk melakukan wawancara dengan merekamnya secara langsung, dan

peneliti mentransfer hasil handnote ke komputer dan menampilkannya dalam hasil penelitian.

### 3. Masyarakat Desa Suangi Timur Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur

Untuk mengetahui sejauh mana partisipasi masyarakat dalam proses keikutsertaan dalam pembangunan desa.

### 4. Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang berisi penjelasan-penjelasan penting tentang masalah yang diteliti, sehingga diperoleh data berbasis data yang lengkap, valid dan non-estimasi dengan menggunakan data-data yang sudah ada dan tersedia dalam catatan dokumen. Dokumentasi ini dibuat untuk memperoleh data, foto dan catatan lapangan.

## 3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu usaha untuk merinci suatu masalah atau fokus penyelidikan menjadi bagian-bagian (idekomposisi) sehingga susunan atau susunan suatu bentuk yang digambarkan atau dilihat dengan jelas dan oleh karena itu dapat dipahami dengan jelas, atau lebih dipahami, untuk memecahkan masalah tersebut. Kualitatif Memahami data dengan lebih baik akan memandu peneliti untuk mengungkap wawasan yang sebelumnya tidak terduga dan membentuk kerangka teoritis baru. Data kualitatif membantu peneliti bergerak lebih jauh dari kerangka tersebut.

Menurut Bogdan & Biklen dalam bukunya (Lexy J. Moleong: *Qualitative Research Methodology*. 2012), analisis data kualitatif

adalah proses mengolah data, mengorganisasikannya, mengklasifikasikannya ke dalam unit-unit yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan modusnya. dilakukan. , temukan apa yang penting, apa yang harus dipelajari, dan putuskan apa yang akan dibagikan dengan orang lain. (Sumber: Moleong, L.J. "Metodologi Penelitian Kualitatif" (2012)).

Selanjutnya analisis data menurut Nasution (1992) yakni :

a) Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu metode analisis data kualitatif. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menyaring, mengkategorikan, mengarahkan, membuang, dan mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik kesimpulan yang definitif. Reduksi tidak perlu ditafsirkan sebagai kuantifikasi data.

b) Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan yang terjadi ketika sekumpulan informasi dikumpulkan, yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan. Penyajian data kualitatif berupa teks naratif (dalam bentuk catatan lapangan), matriks, grafik, kisi-kisi dan bagan.

c) Penarikan Kesimpulan/**Verifikasi**

Kesimpulan merupakan salah satu metode analisis data kualitatif. Temuan merupakan hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.

Penelitian ini menggunakan metode analisis sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan data adalah data yang diperoleh dari sumber penelitian yang belum diolah oleh peneliti.
- 2) Reduksi data dengan membuat abstraksi untuk meringkas pemilihan data sehingga data tersebut dapat disesuaikan dengan penelitian.
- 3) Identifikasi dan kategori Pada bagian ini, peneliti mengidentifikasi dan mengkategorikan sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Hal ini juga dilakukan dengan modifikasi data dan informasi yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

